



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta Nomor. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 Website: www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 30 Juli 2024

Kepada:

Yth. Kepala SKPD se- Kabupaten Magelang
di

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 900/2022/23/2024

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN, BELANJA,
DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DITANDAI
PADA SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR: 900/842/23/2024
TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN,
BELANJA, DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA APBD TAHUN
ANGGARAN 2024 YANG DAPAT DILAKSANAKAN KEMBALI PADA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

A. Umum

Sehubungan dengan telah dilakukannya evaluasi terhadap kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 900/842/23/2024 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, Belanja, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pada APBD Tahun Anggaran 2024, maka perlu ditetapkan surat edaran penetapan kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa yang dapat dilaksanakan kembali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa terhadap kegiatan/sub kegiatan, belanja,

dan pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 900/842/23/2024 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, Belanja, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pada APBD Tahun Anggaran 2024, yang dapat dilaksanakan kembali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Tujuan

- a. Memberikan informasi dan kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 bagi kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 900/842/23/2024 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, Belanja, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pada APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. Menjadi landasan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 bagi kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 900/842/23/2024 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, Belanja, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pada APBD Tahun Anggaran 2024.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengubah Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 900/842/23/2024 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, Belanja, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan.
10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Analisis Standar Belanja.
11. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 8 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kab Magelang Tahun 2024.
12. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.
13. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
14. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 900/842/23/2024 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, Belanja, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pada APBD Tahun Anggaran 2024.

E. Arah Kebijakan

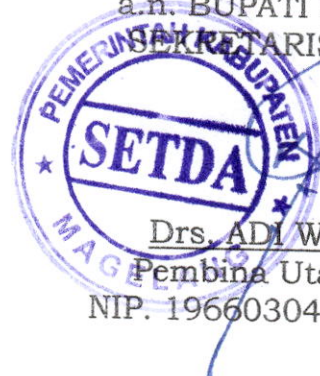
1. Memperhatikan kondisi keuangan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, maka TAPD perlu untuk mencermati kembali dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 900/842/23/2024 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, Belanja, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pada APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Setelah dilakukan pencermatan dan evaluasi terhadap kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang semula ditunda sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 900/842/23/2024 Tentang Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan/Sub Kegiatan, Belanja, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pada APBD Tahun Anggaran 2024, maka terdapat kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa yang dapat dilaksanakan kembali seluruhnya, dapat dilaksanakan kembali sebagian, dan dilakukan rasionalisasi seluruhnya pada Perubahan APBD 2024;

3. Daftar kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan penandaan pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 900/842/23/2024 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, Belanja, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada kolom 6 (enam) Lampiran Surat Edaran ini;
 4. Daftar kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa yang dapat dilaksanakan kembali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada kolom 7 (tujuh) Lampiran Surat Edaran ini;
 5. Daftar kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa yang dirasionalisasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada kolom 8 (delapan) Lampiran Surat Edaran ini;
 6. Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa sebagaimana lampiran Surat Edaran ini;
 7. Seluruh SKPD dalam melaksanakan perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (*at cost*) atau *lumpsum*.
- F. Langkah-langkah rasionalisasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
1. Kepala SKPD mencermati kembali seluruh kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa pada APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA)-SKPD;
 2. Kegiatan/sub kegiatan, belanja, dan pengadaan barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah ditandai dan tidak dilaksanakan, agar dilakukan penyesuaian melalui perubahan Rencana Kerja SKPD, dan selanjutnya diusulkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P.RKPD) Tahun Anggaran 2024;

3. Dokumen Perubahan RKPD menjadi dasar pelaksanaan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19660304 199203 1007

Tembusan ;

1. Penjabat Bupati Magelang
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang
3. Inspektur Kabupaten Magelang
4. Kepala Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Lampiran:

Surat Edaran

Nomor: 900/2022/23/2024

Tentang Penetapan Kegiatan/Sub Kegiatan, Belanja, dan Pengadaan Barang dan Jasa

yang Ditandai pada Surat edaran Sekretaris Daerah Nomor: 900/842/23/2024

tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, Belanja

dan Pengadaan Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2024

yang Dapat Dilaksanakan Kembali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Daftar Kegiatan/Sub Kegiatan, Belanja dan Pengadaan Barang dan Jasa yang Dapat Dilaksanakan Kembali dan yang Rasionalisasi

NO	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penandaan pada SE 842/2024	Dapat Dilaksanakan Kembali	Rasionalisasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DISPARPORA	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	600,000,000.00		600,000,000.00	Menghilangkan kegiatan Ketep Summit
				Pengadaan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Potensi	11,966,036.00		11,966,036.00	Pengadaan Sarpras
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50,000,000.00		50,000,000.00	Belanja Jasa Konsultasi Layanan Kepariwisataaan - Jasa Konsultasi Perencanaan Kepariwisataaan
				Jumlah Disparpora	661,966,036.00		661,966,036.00	
2	DPU PR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	7,910,000,000.00	7,910,000,000.00		Belanja Pengadaan Tanah Sub Keg. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	30,411,011,277.00	5,527,194,971.00
			100,000,000.00				100,000,000.00	Konsultan Pengawasan paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan
			5,994,178,044.00				5,994,178,044.00	Peningkatan Jalan Jeketro - Gondangrejo*
			4,000,000,000.00				4,000,000,000.00	Ruas Jalan Sumurarum - Daleman (Jalan Perempatan Grabag arah Daleman)*
			3,000,000,000.00				3,000,000,000.00	Ruas Jalan Salam - Kaligesik
			3,000,000,000.00				3,000,000,000.00	Ruas Jalan Candimulyo - Bawang
			2,500,000,000.00				2,500,000,000.00	Peningkatan Jalan Ngablak - Ngasinan
			2,093,856,714.00				2,093,856,714.00	Peningkatan Jalan Pakis - Petung
			2,093,856,714.00				2,093,856,714.00	Peningkatan Jalan Pakis Banyusidi - Petungkarang
			1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		Ruas Jalan Ngadipuro - Pucanganom
			1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		Ruas Jalan Dukun - Ngargomulyo
			1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		Ruas Jalan Pirikan - Grabag
			993,555,539.00			993,555,539.00		Ruas Jalan Treko - Mangunsari
			694,667,757.00				694,667,757.00	Ruas Jalan Ngablak - Sumberejo
			694,511,154.00				694,511,154.00	Trotoar Ruas Jalan Muntilan - Talun (Kec. Dukun - Desa Banyudono)
			644,579,420.00			644,579,420.00		Ruas Jalan Danurejo - Bondowoso
			494,314,409.00			494,314,409.00		Ruas Jalan Wuwuharjo , Pandansari - Pandanretno
			412,745,923.00				412,745,923.00	Trotoar Tegalrejo Ruas Jalan Tegalrejo - Pirikan
			394,745,603.00	394,745,603.00		Ruas Jalan Dalam Kota Muntilan (Jl. Dr. Sutomo)		

NO	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penandaan pada SE 842/2024	Dapat Dilaksanakan Kembali	Rasionalisasi	Keterangan
					300,000,000.00		300,000,000.00	Peningkatan Jalan Sawangargo - Jebengsari
				Rehabilitasi Jalan	6,125,910,100.00	2,989,125,281.00	3,136,784,819.00	
					2,989,125,281.00	2,989,125,281.00		Ruas Jalan Dalam Kota Mertoyudan (Saragan - DPRD Kota Magelang)
					2,192,423,372.00		2,192,423,372.00	Ruas Jalan Ketundan, Banyusidi - Posong
					546,662,679.00		546,662,679.00	Ruas Jalan Sonorejo-Trenten
					397,698,768.00		397,698,768.00	Ruas Jalan Ngablak - Sumberejo
				Rehabilitasi Jembatan	700,000,000.00		700,000,000.00	ASB Pembangunan Jembatan dengan Bentang < 20 m, Jembatan Tempurejo di Jalan Poros Desa Tempuran, Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2,025,000,000.00	2,025,000,000.00		Pembangunan fasilitas TPST Klegen Sub Keg. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
				Jumlah DPU	47,171,921,377.00	18,451,320,252.00	28,720,601,125.00	
3	DISDAGKOP DAN UKM	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	401,401,500.00		401,401,500.00	Penyusunan Dokumen AMDAL Pasar Ngablak
					1,520,000,000.00		1,520,000,000.00	Perawatan dan Pemeliharaan Pasar Kabupaten Magelang
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten / kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	840,000,000.00	840,000,000.00		Belanja Natura dan Pakan - Natura Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan
				Jumlah Disdagkop dan UKM	2,761,401,500.00	840,000,000.00	1,921,401,500.00	
4	DISPETERIKAN	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	684,858,240.00		684,858,240.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan
				Jumlah Dispeterikan	684,858,240.00		684,858,240.00	
5	DLH	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	49,991,459.00		49,991,459.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
				Jumlah DLH	49,991,459.00		49,991,459.00	
6	DISTANPANGAN	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	168,000,000.00	168,000,000.00		Efisiensi narasumber Pelatihan dan pembinaan kelompok petani
				Jumlah Distanpangan	168,000,000.00	168,000,000.00		
7	INSPEKTORAT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138,234,727.00	138,234,727.00		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41,348,588.00	41,348,588.00		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,617,139.00	24,617,139.00		Belanja Modal Alat Ukur Universal Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penandaan pada SE 842/2024	Dapat Dilaksanakan Kembali	Rasionalisasi	Keterangan
				Pengadaan Mebel	50,717,625.00	50,717,625.00		Belanja Modal Meja Rapat Pejabat Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
				Pengadaan Mebel	17,673,846.00	17,673,846.00		Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
				Pengadaan Mebel	15,780,221.00	15,780,221.00		Belanja Modal Mebel Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,864,495.00	199,864,495.00		Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00		Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Jasa Konsultan Perencanaan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00		Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Jasa Konsultan Pengawasan
				Jumlah Inspektorat	508,236,641.00	508,236,641.00		
8	DINAS KESEHATAN	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1,136,519,137.00		1,136,519,137.00	Belanja Obat-Obatan-Obat - Kegiatan Obat Vaksin BMHP Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	310,296,951.00		310,296,951.00	Bahan Lainnya - Peralatan Laboratory Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Dinas Kesehatan
				Jumlah Dinas Kesehatan	1,446,816,088.00		1,446,816,088.00	
9	RUMAH SAKIT UMUM BUKIT MENOREH	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	5,000,000,000.00		5,000,000,000.00	Bangunan gedung
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah sakit	327,544,635.00		327,544,635.00	Belanja modal kendaraan bermotor penumpang (ambulan)
				Jumlah RSUD Bukit Menoreh	5,327,544,635.00		5,327,544,635.00	
10	DINAS SOSIAL PPKB PPPA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	695,102,587.00		695,102,587.00	Rehabilitasi Gedung TEA Tanjung Rp 395.102.587,00
				Jumlah Dinsos PPKB PPA	695,102,587.00		695,102,587.00	
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAN KEBAKARAN	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	109,466,280.00	109,466,280.00		Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran_Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	147,307,613.00	147,307,613.00		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas_Sub Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan satuan Perlindungan Masyarakatg Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	36,800,400.00	36,800,400.00		
				Jumlah Satpol PP dan PK	293,574,293.00	293,574,293.00		

NO	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penandaan pada SE 842/2024	Dapat Dilaksanakan Kembali	Rasionalisasi	Keterangan	
12	BPBD	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	115,472,814.00	115,472,814.00		Alat Pemadam Kebakaran - Baju Tahan Panas Nomex III A 7,0 Oz jenis Rip Stop	
					29,456,412.00	29,456,412.00		Alat Pemadam Kebakaran - Helm Safety Pemadam	
					11,046,151.00	11,046,151.00		Boots Pemadam Harvik	
					3,682,048.00	3,682,048.00		Alat Pemadam Kebakaran - Sarung Tangan Pemadam Kebakaran	
			Jumlah BPBD	159,657,425.00	159,657,425.00				
13	BKPPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,146,459.00		10,146,459.00	Belanja bahan bangunan dan konstruksi_sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah BKPPD	10,146,459.00	10,146,459.00		
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	351,064,140.00		351,064,140.00	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional)	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD	870,270,000.00		870,270,000.00	Belanja Sewa Peralatan Umum (Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional)	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	485,450,000.00		485,450,000.00		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP	1,007,400,397.00		1,007,400,397.00		
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (hibah kurleb 4,4M)	290,140,000.00		290,140,000.00		
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	273,581,472.00		273,581,472.00	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	604,180,893.00		604,180,893.00	
Jumlah DISDIKBUD	3,882,086,902.00	3,882,086,902.00							
15	BPPKAD	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3,652,620,000.00		3,652,620,000.00	Jasa konsultan pajak	
					Jumlah BPPKAD	3,652,620,000.00	3,652,620,000.00		
16	BAPPEDA DAN LITBANGDA	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	150,000,000.00	150,000,000.00		Penyusunan Rancangan RPJPD	
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	80,000,000.00		80,000,000.00	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	70,000,000.00		70,000,000.00	Pelaksanaan Musrenbang	
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	54,000,000.00		54,000,000.00		
				Jumlah Bappeda dan Litbangda	354,000,000.00	150,000,000.00	204,000,000.00		
17	Seluruh SKPD	Semua Program	Semua Kegiatan	Semua Sub Kegiatan	4,844,440,561.00		4,844,440,561.00	Honorarium Narasumber sebesar 50%	
			Jumlah	Jumlah	4,844,440,561.00		4,844,440,561.00		

NO	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penandaan pada SE 842/2024	Dapat Dilaksanakan Kembali	Rasionalisasi	Keterangan
18	Seluruh SKPD	Semua Program	Semua Kegiatan	Semua Sub Kegiatan	34,367,184,631.00		34,367,184,631.00	Rasionalisasi Belanja Pegawai dan Tenaga Pendukung Kegiatan (Supporting staf)
				Jumlah Belanja Pegawai	34,367,184,631.00		34,367,184,631.00	
19	BPPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	24,975,204,000.00	20,225,204,000.00	4,750,000,000.00	Penundaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
				Jumlah BKK	24,975,204,000.00	20,225,204,000.00	4,750,000,000.00	
20	DINAS KESEHATAN			SILPA BLUD 2023 RSUD Merah Putih	3,869,054,506.00		3,869,054,506.00	Penyetoran SILPA BLUD 2023
				SILPA BLUD 2023 RSUD Muntilan	12,130,487,366.00		12,130,487,366.00	Penyetoran SILPA BLUD 2023
				SILPA BLUD 2023 Puskesmas	1,442,628,455.00		1,442,628,455.00	Penyetoran SILPA BLUD 2023
				Jumlah SILPA BLUD	17,442,170,327.00		17,442,170,327.00	
TOTAL KESELURUHAN					149,456,923,161.00	40,795,992,611.00	108,660,930,550.00	



BUPATI MAGELANG
 SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADI WARYANTO
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19660304 199203 1007